



Pemerintah Tahan Izin Hotel Baru

Pemerintah menjaring masukan dari PHRI Yogyakarta.

L.N. Idayanie

idayani@tempo.co.id

YOGYAKARTA — Dinas Perizinan Kota Yogyakarta masih menahan pengurusan izin pembangunan sejumlah hotel baru yang dimohonkan mulai akhir 2013 hingga berakhirnya moratorium pada akhir tahun ini. "Hampir 30-an hotel belum bisa kami keluarkan izin pembangunannya," ujar Kepala Bidang Pelayanan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, Setiono, kemarin.

Menurut Setiono, sejak moratorium diberlakukan Pemerintah Kota Yogyakarta pada awal 2014, ada 106 permohonan izin pembangunan hotel. Dari jumlah itu, Dinas Perizinan baru mengeluarkan izin untuk 85

hotel baru. "Kebanyakan terhambat karena belum mendapat surat persetujuan masyarakat sekitar. Jadi, kami tak bisa mengeluarkan izinnnya. Persetujuan warga sekitar itu syarat pokok," kata dia.

Dari total hotel yang sudah mendapatkan izin itu, kata Setiono, baru 50-an yang sudah melakukan pembangunan. Sisanya sama sekali belum memulai pembangunan. "Bagi hotel yang sudah dapat izin tapi belum mulai membangun, kira-kira waktunya 1,5 tahun sejak izin dikeluarkan. Jika melebihi batas waktu, ya, izin kami tarik," ujarnya.

Pemerintah Kota Yogyakarta mencatat, pemasukan di luar pajak dari retribusi perizinan pembangunan hotel sangat signifikan bagi daerah. Target retri-

busi perizinan hotel tahun ini sebesar Rp 5 miliar. Pada triwulan pertama ini, sudah tercapai 40 persen.

Moratorium hotel di Yogyakarta bakal berakhir seiring dengan selesainya masa jabatan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti, akhir tahun ini. Haryadi sebelumnya berencana memperpanjang masa berlaku moratorium yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel itu. "Okupansi hotel yang ada masih di bawah 70 persen, sehingga pembangunan hotel baru belum diperlukan," kata Haryadi.

Haryadi mengungkapkan, rencana perpanjangan masa berlaku moratorium itu akan diwujudkan Pemerintah

Kota Yogyakarta setelah menggelar berbagai kajian dan menjaring masukan terutama dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Yogyakarta.

Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Untung Supriyanto, mengatakan, berkaca dari maraknya kasus hotel ilegal atau belum memiliki izin namun sudah beroperasi pada 2015, pemerintah wajib mengawasi pembangunan hotel secara ketat dan berkala. "Faktor toleransi waktu yang terlalu panjang bagi hotel untuk melengkapi izinnnya terbukti memicu pelanggaran hotel tak berizin, terutama izin gangguan. Karena ini berkaitan dengan komunikasi dengan masyarakat," kata dia.

● PRIBADI WICAKSONO

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005